



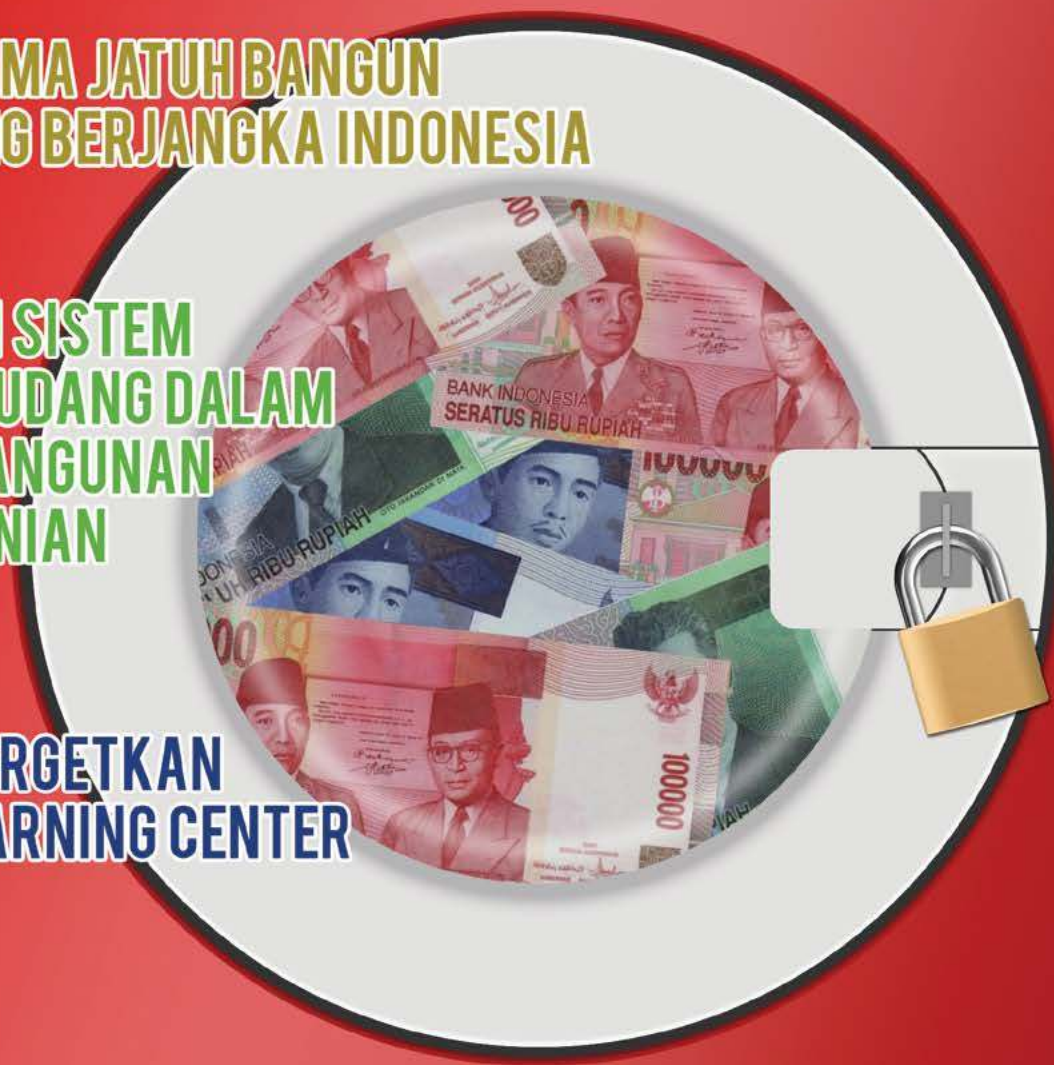
Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**BERSAMA JATUH BANGUN
KLIRING BERJANGKA INDONESIA**

**PERAN SISTEM
RESI GUDANG DALAM
PEMBANGUNAN
PERTANIAN**

**JFX TARGETKAN
22 LEARNING CENTER**



**PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
UPAYA MENGUNCI "PENCUCI UANG"**



BERITA UTAMA

**Perdagangan Berjangka Komoditi
Upaya Mengunci "Pencuci Uang"**

10 ▶ RESI GUDANG

Bappebti Bersama KKP
Lahirkan SRG Garam Pertama

12 ▶ PASAR LELANG

- Pemerintah Tetapkan Pemenang Tender Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi
- Siak Dorong Persiapan Pasar Lelang Karet

14 ▶ AGENDA FOTO

16 ▶ AKTUALITA

- Sosialisasi Sistem Resi Gudang Terus Digenjot
- Sertifikat Internasional Untuk Kakao Jembrana
- Indonesia Pertanyakan Resolusi Uni Eropa Soal CPO
- JFX Targetkan 22 Learning Center

18 ▶ ANALISA

19 ▶ BREAKING NEWS

20 ▶ INFO

21 ▶ INFO HARGA

22 ▶ KOMIKITA

KOLOM

Prof. Dr. Bustanul Arifin

**Peran Sistem Resi Gudang
dalam Pembangunan Pertanian**

26

Tris Sudarto

KIPRAH

**Bersama Jatuh Bangun
Kliring Berjangka Indonesia**



buletin Bappebti
Membangun Dengan Integritas

Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab

Bachrul Chairi

Redaktur

Nusa Eka

Penyunting / Editor

Fajarini Puntodewi
Annisa F Wulandari
Apriliyanto

Fotografer

Gita Regina
Leli Wulandari

Sekretaris

Katimin

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Bappebti Kementerian Perdagangan

@InfoBappebti

@Bappebti

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id



Foto : Kepala Bappebti, Bachrul Chairi (kanan) menandatangani dokumen perjanjian kerja sama dengan Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae (kiri) di bidang pertukaran informasi pelanggaran kewajiban pelaporan dan koordinasi pengenaan sanksi administratif (2/5).

Selasa pagi tanggal 2 Mei 2017 menjadi salah satu momen penting bagi Bappebti, karena pada hari itu Bappebti menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di bidang pertukaran informasi pelanggaran kewajiban pelaporan dan koordinasi pengenaan sanksi administratif. Perjanjian kerja sama ditandatangani Kepala Bappebti Bachrul Chairi dan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Kerjasama ini dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme pada sektor transaksi perdagangan berjangka, karena menurut Wakil Kepala PPATK seiring meningkatnya transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), semakin rentan pula industri tersebut disusupi tindakan-tindakan penyalahgunaan dana. Melalui kerjasama ini diharapkan pelaporan transaksi bisa berjalan lancar antara Bappebti, PPATK, dan Perusahaan Pialang Berjangka.

Dalam kesempatan ini Bachrul Chairi menyampaikan Bappebti telah menyelesaikan dua dokumen kegiatan sesuai rencana aksi yang diusulkan PPATK, yakni 'Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta' dan dokumen 'Penilaian Risiko TPPU/TPPT pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017.

Kerjasama Bappebti dan PPATK ini menjadi topik yang kami angkat dalam Berita Utama edisi kali ini, karena masalah pencegahan dana teroris menjadi perhatian dan juga keprihatinan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu kami juga menyajikan berbagai informasi dan perkembangan menarik lainnya, antara lain tentang Gudang SRG Garam pertama di Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi bulan Juli mendatang. Pada rubrik Kolom kami paparkan pendapat Prof. Bustanul Arifin yang membahas masalah Sistem Resi Gudang. Kami juga menampilkan sosok Tris Sudarto dalam rubrik Kiprah. Tris Sudarto yang saat ini menjabat Dirut PT KBI (Kliring Berjangka Indonesia) sebentar lagi memasuki masa pensiun. Walau ia masih 54 tahun tapi tidak bisa lagi diperpanjang masa jabatannya, karena Tris sudah menjabat dua kali berturut-turut.

Tak ketinggalan kami sampaikan juga perkembangan informasi terbaru dalam rubrik Aktualita, serta Analisa mengenai harga minyak sawit (CPO) serta informasi penting lainnya.

Dalam kesempatan yang baik ini Tim Redaksi menyampaikan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa di bulan Ramadhan bagi umat Islam dimanapun berada. Semoga para pembaca Bulletin Bappebti diberkahi Allah SWT. Amin.



Perdagangan Berjangka Komoditi

Upaya Mengunci “Pencuci Uang”

Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk menutup dan mengunci pintu masuk para pelaku kriminal yang bermaksud menanamkan uang hasil kejahatan mereka guna mendanai aksi-aksi terorisme

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan bentuk kejahatan serius yang bisa mengancam perekonomian negara. Ancaman semakin luas ketika kejahatan pencucian uang berkelindan dengan kegiatan pendanaan terorisme. Oleh sebab itu pemerintah terus meningkatkan upaya untuk mencegah dan memberantas kedua tindak kejahatan yang kini menjadi perhatian dunia internasional tersebut. Upaya yang penting dilakukan yaitu menutup dan mengunci pintu masuk bagi para pelaku kriminal untuk menanamkan uang hasil kejahatannya dan menggunakannya untuk pendanaan terorisme.

Ada banyak jenis industri yang berisiko tinggi dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang. Menurut *National Risk Assessment 2015* sektor perbankan dan pasar modal merupakan

industri yang berisiko tinggi (*high risk*) menjadi sarana pencucian uang. Sektor lain yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu industri penjualan properti dan kendaraan bermotor. Sedangkan lembaga pembiayaan masuk kategori dengan risiko menengah. Bagaimana dengan perdagangan berjangka komoditi?

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, Sri Hariyati menjelaskan, perdagangan berjangka komoditi tidak termasuk sektor industri yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun bukan berarti hal itu tidak memerlukan perhatian dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme



“Perjanjian kerjasama Bappebti-PPATK akan memudahkan kedua institusi melakukan koordinasi dalam menangani pelanggaran kewajiban pelaporan oleh pialang berjangka jika ada transaksi yang mencurigakan pada nasabah”

(TPPT). “Jangan sampai, karena di sektor lain seperti perbankan dan pasar modal berlaku aturan sangat ketat, para pelaku TPPU masuk ke sini (perdagangan berjangka komoditi) karena dinilai lebih longgar,” ujar Sri Hariyati. Menurutnya, semua sektor harus *equal*, sehingga tidak ada kesempatan sekecil apapun bagi pelaku TPPU dan TPPT untuk masuk.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT Bappebti telah menjalin kerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Naskah kerja sama ditandatangani oleh Kepala Bappebti Bachrul Chairi dan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rai di Jakarta, tanggal 2 Mei 2017. Bachrul menjelaskan, perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman (MOU) antara Bappebti dan PPATK pada 7 November 2008. Salah satu butir kesepakatan dalam MOU yaitu dilakukannya pertukaran informasi terkait pelanggaran kewajiban pelaporan oleh pialang berjangka. Dengan perjanjian kerjasama ini kedua institusi lebih mudah melakukan koordinasi dalam penanganan

pelanggaran kewajiban pelaporan oleh pialang berjangka manakala ada transaksi yang mencurigakan pada nasabah.

“Perjanjian kerja sama kali ini untuk mendorong efektivitas pelaksanaan penerapan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan,” ungkap Bachrul.

Dalam UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Bappebti termasuk Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelapor – dalam hal ini pialang berjangka – terkait transaksi yang dilakukan nasabah.

Menurut Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati, sanksi yang diberikan oleh Bappebti kepada pialang berjangka yang melakukan pelanggaran tentang kewajiban pelaporan adalah sanksi administratif berupa teguran, peringatan, hingga yang terberat yaitu pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin. “Kalau ada indikasi

tindak pidana, itu menjadi kewenangan PPATK untuk menganalisis dan membawanya ke lembaga penyidik,” jelas Sri.

Prinsip Mengenal Nasabah

Dijelaskan Sri Hariyati, untuk mencegah masuknya dana hasil kejahatan dalam bisnis perdagangan berjangka komoditi pihak pialang berjangka harus benar-benar mengenali nasabahnya. “Pialang harus mengetahui siapa nasabahnya, apa pekerjaannya, dari mana sumber dana nasabahnya,” ungkap Sri.

Pialang berjangka harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2/2016. Dalam peraturan yang diundangkan di Jakarta pada 18 Mei 2016 itu disebutkan bahwa prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang wajib diterapkan pialang berjangka untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah; memantau rekening dan transaksi nasabah; dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan (TKM).

“Dari awal harus disaring. Jangan

Lebih jauh, untuk calon nasabah dan nasabah yang tergolong berisiko tinggi pialang berjangka wajib melakukan enhanced due diligence (EDD) atau uji tuntas lanjut.



sampai uang hasil kejahatan narkoba, korupsi, masuk ke kita. Makanya perlu prinsip mengenal nasabah. Sebelum jadi nasabah, lihat profilnya, misalnya dia penghasilannya segini koq punya uang segini. Make sense nggak,” ungkap Sri mencontohkan.

Dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2/2016 telah ditentukan secara detil data-data apa saja dari nasabah yang harus diketahui pialang berjangka. Peraturan ini juga mewajibkan pialang melakukan *customer due diligence* (CDD) atau uji tuntas nasabah. Yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan atau pola transaksi nasabah.

CDD wajib dilakukan pada saat proses penerimaan calon nasabah menjadi nasabah berjangka dan ketika nasabah melakukan transaksi perdagangan berjangka. CDD juga wajib dijalankan bila terdapat keraguan akan kebenaran data, informasi, dan atau dokumen

pendukung yang diberikan nasabah. Atau, jika terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Lebih jauh, untuk calon nasabah dan nasabah yang tergolong berisiko tinggi pialang berjangka wajib melakukan *enhanced due diligence* (EDD) atau uji tuntas lanjut. Mereka yang tergolong berisiko tinggi terkait TPPU yaitu orang-orang yang populer secara politis (*politically exposed persons/PEP*) misalnya kepala negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat pengadilan atau militer, eksekutif senior BUMN, partisan partai politik besar.

Menyongsong MER

Dengan prinsip mengenal nasabah, menjalankan CDD dan EDD risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi bisa ditekan. Selain peraturan

tentang Prinsip Mengenal Nasabah, Bappebti juga menerbitkan peraturan tentang pemblokiran dana nasabah yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme. Yaitu Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka atas Dana Yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Dalam peraturan itu disebutkan, pialang berjangka wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap dana nasabah yang terdapat di rekening terpisah pialang berjangka, apabila nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang dikeluarkan oleh Kapolri berdasar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Bappebti juga menerbitkan dokumen tentang penilaian risiko TPPU/TPPT pada sektor perdagangan berjangka komoditi tahun 2017.

INFOGRAFIS RISIKO PENCUCIAN UANG

JENIS PJK	LEVEL RISIKO	KATEGORI RISIKO
Perbankan	55,9	Tinggi
Pasar Modal	54,1	Tinggi
Perusahaan/Agen Properti	53,5	Tinggi
Pedagang Kendaraan Bermotor	45,0	Tinggi
Perusahaan Pembiayaan	44,1	Menengah
Pedagang Valas	43,8	Menengah
Pedagang Logam Mulia	42,6	Menengah
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang-KUPU	39,7	Menengah
Pedagang Barang Seni/Antik	38,8	Menengah
Balai Lelang	36,1	Menengah
Asuransi	33,4	Menengah
Dana Pensiun	9,0	Rendah

Sumber: Laporan Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2015, Tim NRA PPAATK

Penerbitan beberapa peraturan dan dokumen oleh Kepala Bappebti terkait pencegahan TPPU dan TPPT mendapat apresiasi PPAATK. Penerbitan peraturan-peraturan tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi Bappebti dalam mendukung upaya pemerintah memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu juga membantu pemerintah dalam menghadapi *mutual evaluation review* (MER) pada November 2017. Melalui MER Indonesia sebagai anggota *Asia-Pacific Group on Money Laundering* (APG) akan dievaluasi soal kepatuhannya menjalankan rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam pencegahan TPPU/TPPT.

FATF merupakan organisasi antar-pemerintah yang berisi para pakar di bidang hukum, keuangan, yang membantu pemerintah negara-negara

menyusun peraturan-peraturan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF juga memonitor kemajuan anggotanya dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan pencucian uang.

Saat ini anggota FATF berjumlah 37 negara, dan Indonesia hingga kini masih belum menjadi anggota forum yang melakukan kajian-kajian tentang kejahatan pencucian uang dan teknik-teknik untuk memeranginya itu. Seperti dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada media belum lama ini, pemerintah berharap Indonesia bisa segera masuk menjadi anggota FATF, karena banyak keuntungan yang didapat dengan menjadi anggota FATF khususnya dalam upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA
OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG
ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN
ORGANISASI TERORIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pihak Pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki dan dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. bahwa Perusahaan Pialang Berjangka telah ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan wajib melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta oleh Pialang Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan Dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS.

Pasal 1

1. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
2. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
3. Rekening yang Terpisah adalah rekening Pialang Berjangka pada bank penyimpanan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.
Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang.

5. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Pialang Berjangka wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka, apabila identitas Nasabah yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Pasal 3

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 4

Pemblokiran serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran serta merta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2017**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

ttd

BACHRUL CHAIRI

Untuk informasi lebih lanjut bisa di akses :

https://bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2017-04-26_08-53-13_Perka_4-2017_12_april_2017_DTTOT_hasil_kumham-sebar_luas.pdf



BAPPEBTI BERSAMA KKP LAHIRKAN SRG GARAM PERTAMA

Garam merupakan komoditi yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena itu pemerintah berusaha untuk memenuhinya. Guna memenuhi kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani garam, sebentar lagi akan dioperasikan gudang SRG garam yang pertama di Indonesia.

Sudah lama Kementerian Perdagangan melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) bercita-cita ingin membangun sistem resi gudang atau SRG untuk komoditi garam. Sebab disadari petani garam juga menghadapi masalah klasik soal anjloknya harga saat panen raya, dan persoalan modal yang cekak untuk memulai kerja kembali.

Harapan itu sebentar lagi akan terwujud dengan dioperasikannya gudang SRG di Pati, Jawa Tengah. Penerbitan Resi Gudang ditargetkan pada musim panen garam pada pertengahan 2017. "Ini merupakan gudang SRG garam pertama di Indonesia. Kita targetkan bulan Juli akan ada resi gudang yang diterbitkan. Kita cari momentum saat panen raya garam," ujar Retno Rukmawati, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem

Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) Bappebti di Jakarta, Selasa (16/5). Panen garam di wilayah Pulau Jawa biasanya berlangsung saat musim kemarau antara bulan Juli-September setiap tahunnya. Pada bulan-bulan lainnya petani garam masih bisa panen, namun hasilnya tidak sebanyak dan sebaik pada saat musim kemarau.

Beroperasinya gudang SRG Garam di Pati merupakan hasil kerjasama antara Bappebti (Kemendag) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemda Kabupaten Pati dan juga dengan PT Garam (Persero) sebagai perusahaan milik BUMN yang biasa memproduksi dan memasarkan garam. Gudang SRG di Pati ini dibangun termasuk dalam program PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat), yakni program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan produksi

dan kualitas garam serta peningkatan kesejahteraan petani garam. Program PUGAR juga ditujukan untuk mendukung swasembada garam nasional.

Di gudang SRG di Pati selain menjadi pengelola gudang PT Garam juga akan akan mendampingi sebuah koperasi, yakni Koperasi Mutiara Laut Mandiri untuk memberikan bimbingan selama 3 hingga 6 bulan. Melalui bimbingan tersebut diharapkan nantinya koperasi memiliki kemampuan untuk menjadi pengelola gudang SRG. "Koperasi kan punya anggota dan mitra petani yang jumlahnya banyak. Diharapkan para petani memanfaatkan fasilitas Sistem Resi Gudang ini untuk kepentingan permodalan mereka," kata Retno.

PT GARAM JAMIN PEMBELIAN

Bagi para petani garam kehadiran SRG Garam ini akan sangat menolong pada saat-saat harga jual garam mereka jatuh. Ini yang terjadi pada setiap kali musim panen raya tiba. Hampir sama seperti petani padi, petani garam juga menghadapi situasi yang serupa. Beberapa petani garam yang ditemui staf Bappebti di lapangan menyatakan mereka menyambut gembira akan beroperasinya SRG ini.

Apalagi dalam SRG Garam ini ada PT Garam (Persero) yang berperan sebagai *standby buyer*. Dengan adanya pembeli yang siap menyerap hasil panennya ini, para petani menjadi tidak khawatir produksi garam mereka akan sia-sia dan tidak bisa dijual. PT Garam sendiri akan membeli berdasarkan harga patokan yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah. "Namun PT Garam tidak menutup celah jika petani ingin menjual kepada pihak lain yang mereka anggap lebih menguntungkan. Jadi boleh-boleh saja petani menjual ke perusahaan lain dan tidak harus ke PT Garam. Tetapi jika tidak ada perusahaan lain yang membeli garam petani itu, maka PT Garam siap untuk membelinya," ungkap Retno Rukmawati.

Sebagaimana telah berlaku di SRG Gabah, agar hasil panen garamnya bisa diterima di gudang SRG petani garam juga harus memenuhi spesifikasi mutu garam yang ditetapkan. Bagi Bappebti ini menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan edukasi kepada para petani. Namun Retno Rukmawati yakin masalah ini bisa cepat diatasi, sebab dalam praktek sehari-hari para petani sesungguhnya sudah menjalankan kriteria mutu garam tersebut. "Masalahnya, mereka tidak terbiasa dengan ukuran-ukuran tertentu. Tetapi dalam praktek sehari-hari mereka sudah biasa memenuhi mutu, karena mereka juga biasa menjual ke PT Garam," ujar Retno. Sebagai gambaran, untuk garam industri kadar NaCl yang diterima adalah 97 persen, sementara kadar NaCl garam produksi para petani umumnya berkisar sekitar 94 persen.

GUDANG KHUSUS GARAM

Sampai saat ini sudah tersedia 6 gudang garam nasional yang dibangun oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan siap dijadikan sebagai gudang SRG. Tetapi Bappebti hati-hati dan melangkah tahap demi tahap dalam melaksanakan SRG ini. Untuk tahap

pertama, gudang yang dioperasikan adalah yang berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lima gudang lainnya terdapat di yaitu Kabupaten Pamekasan (Jawa Timur), Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat).

Berbeda dengan gudang gabah atau beras, gudang untuk komoditi garam dibangun dengan material khusus yang harus tahan karat mengingat sifat garam yang korosif. Gudangnya harus spesifik. Material gudangnya juga khusus. "Kalau garam rakyat, gudangnya biasanya dari kayu, jadi tidak berkarat. Nah, dalam SRG kita juga mempertimbangkan sisi keamanan, jadi dindingnya harus kokoh dan tahan korosi atau tahan karat, sehingga dindingnya harus dilapis dengan cat tertentu," jelas Retno.

Sementara garam yang disimpan tidak dikemas dalam karung sebagaimana gabah atau beras, melainkan disimpan dalam bentuk curah. "Jadi garam dari petani yang satu akan bercampur (*commingle*) dengan garam milik petani yang lain. Hal ini sebenarnya tidak jadi masalah, karena jenis dan mutunya kan sudah sama. Kalau gabah atau beras karungnya diberi label. Pada garam tidak dilakukan hal semacam itu, karena kalau itu dilakukan jadi tidak efisien. Yang penting spesifikasi garamnya sama. Rasanya kan masih tetap asin juga," kata Retno sambil tertawa.



Pemerintah Tetapkan Pemenang Tender Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, menyampaikan surat keputusan (SK) no. 684/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Penetapan Penyelenggara Lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) sudah ditandatangani pada Jumat (12/5). Kemendag memang telah menetapkan pemenang tender untuk menyelenggarakan pasar lelang GKR, yakni PT. Pasar Komoditas Jakarta. Pasar lelang GKR rencananya dilaksanakan pada Juni 2017.

Kemendag juga sudah menetapkan GKR yang diproses dari gula mentah impor hanya dapat diperdagangkan melalui mekanisme pasar lelang komoditi. Tujuannya adalah untuk memotong mata rantai pemasaran dan distribusi yang panjang. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.16/M-DAG/PER/3/2017 yang diundangkan pada 17 Maret 2017. Dalam pelaksanaan lelang, Mendag

akan mengatur harga batas bawah dan atas penjualan GKR secara berkala.

"Jadi, dari empat perusahaan yang melalui proses tender, sudah kita pilih satu sebagai penyelenggara. Proses berikutnya kita siapkan PTT (Peraturan Tata Tertib) lelangnya. Di situlah peran Bappebti mengontrol semua proses lelang," ujar Bachrul Chairi di Jakarta, Senin (15/5).

Setelah proses pertama dan kedua, yakni penetapan penyelenggara serta pembuatan PTT rampung, tahap sosialisasi bisa dilakukan pada akhir Mei. PTT akan membahas secara detail perihal teknis lelang. Adapun proses lelang GKR yang dilaksanakan pada Juni itu dengan format jual beli menggunakan sistem online.

Dalam hal ini, Bappebti sudah memiliki data-data perusahaan yang biasa melakukan transaksi GKR dalam jumlah besar. Jika ternyata belum terdaftar, perusahaan yang ingin ikut serta dalam lelang dapat melakukan

pendaftaran secara online.

Bachrul mengatakan dalam setahun jumlah kebutuhan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman domestik sekitar 2,5 juta ton. Diperkirakan volume GKR yang masuk dalam pasar lelang komoditi nanti bisa mencapai 50 persen dari jumlah itu.

Gula merupakan produk strategis, sehingga pemerintah perlu melakukan kontrol secara penuh dalam setiap prosesnya. Nantinya, transaksi lelang GKR akan tercatat di dalam *machine engine* milik bursa berjangka dan menggunakan sistem *e-barcoding*.

Menurut Bachrul, dengan *e-barcoding*, Bappebti bisa memonitor, misalnya 10 kg gula di Brebes dapat diketahui berasal dari Australia, Brasil, atau Thailand. Kapan gula tersebut dikirim, menggunakan kapal apa, itu bisa diketahui. Jadi, juga bisa diketahui perusahaan yang jual, tahan, atau bocorkan. Kesemuanya bisa dipantau secara sistematis.



Siak Dorong Persiapan PASAR LELENG KARET

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Sujarwo, mendorong daerahnya untuk bisa memiliki pasar lelang karet dalam rangka menstabilkan harga komoditi tersebut dan memutus panjangnya mata rantai penjualan. "Kalau daerah lain berhasil memutus mata rantai penjualan dengan pasar lelang, tentu tidak ada salahnya kita mencontoh ke kabupaten/kota yang sudah terlebih dahulu memulai," kata Sujarwo, Rabu (17/5).

Menurut Sujarwo, dewan akan mendiskusikan lebih lanjut kepada instansi terkait (dinas pertanian) tentang tata cara dan prosedur yang harus dipersiapkan untuk bisa memproses urusan pembuatan pasar lelang karet itu. Jika pasar lelang bisa memberikan solusi untuk membantu rakyat (petani), maka pihaknya akan mendorong pemerintah untuk melaksanakannya.

Meski pada saat ini harga atau

pasaran getah di kabupaten Siak yang dibeli toke atau pedagang perantara ke petani setempat masih normal, yakni sekitar Rp6.000-6.500 per kilogram. Baginya harga segitu masih standar, tidak tinggi, namun tidak juga terlalu rendah.

Adapun Yusrian, Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Pertanian, mengatakan fluktuatifnya harga getah karet saat ini merupakan hal yang biasa. Kebutuhan pasar terhadap karet rendah, maka dampaknya akan membuat harga beli karet semakin turun, ditambah lagi harga komoditi ini ditentukan oleh dunia.

Secara keseluruhan kualitas getah di kabupaten Siak tergolong rendah atau kurang bagus. Karena banyak petani yang memilih menggunakan tawas daripada asam semut, serta memasukkan tatal.

"Selain itu, animo atau gairah petani karet semakin menurun, mengingat ketidakstabilan harga. Tidak banyak juga petani yang mau melakukan

peremajaan, meski sudah dibantu bibit. Sebab kebanyakan karet masyarakat tersebut masih karet warisan. Ditambah lagi harga getah ditentukan langsung oleh pasar dunia," katanya.

Selain menurunnya kualitas getah sebagai pemicu rendahnya harga komoditi itu, Yusrian juga menyebutkan Kabupaten Siak juga belum memiliki pasar lelang karet. Sebagai tempat berkumpulnya petani getah karet untuk menjual langsung tanpa lagi melalui toke perantara.

"Layaknya Kabupaten/Kota lainnya kami belum memiliki pasar lelang karet. Padahal, setidaknya jika ada pasar lelang akan memotong jalur distribusi," tandasnya.

Kunjungan Kerja Mendag ke Jawa Tengah



Kepala Bappebti Bachrul Chairi mendampingi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan peninjauan ke PT Pura Agro Mandiri di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/5). PT Pura merupakan salah satu perusahaan yang memiliki ruang pendingin (*cold storage*) dengan paduan teknologi *Control Atmosphere Storage* (CAS) dan Pendingin (*Refrigerator*) dengan pengontrol RH, O₂, CO₂, N₂ dan Ethylene. Teknologi ini bisa mengawetkan komoditi sayuran terutama bawang merah yang memungkinkan petani menyimpan panen bawang merahnya selama 3-6 bulan dengan kualitas dan kesegaran yang tetap terjaga.

Bappebti-Aspebtindo Diseminasi Peraturan Kepala Bappebti

Bappebti bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Hotel Emerald Garden, Medan, Selasa (9/5). Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka diseminasi peraturan Kepala Bappebti antara lain Pelaksanaan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Customer Due Diligence*); Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki oleh Orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT, termasuk penyampaian "Penilaian Risiko TPPU/TPPT (*Sectoral Risk Assessment*) Pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017".



Seminar Perkuat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Investasi Ilegal

Kepala Bappebti Bachrul Chairi didampingi Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati menghadiri Seminar Nasional Waspada Investasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (2/5). Seminar ini untuk memperkuat koordinasi pencegahan dan pemberantasan praktek investasi ilegal serta lebih menyatukan persepsi, visi dan misi penegakan hukum agar lebih efektif dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap potensi kerugian yang diakibatkan oleh penawaran investasi maupun penghimpunan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta pencegahannya.



Literasi PBK Tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris



Untuk mencerdaskan masyarakat tentang perdagangan berjangka Bappebti bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Surabaya, Rabu (3/5). Dalam pertemuan bertema "Industri Perdagangan Berjangka Komoditi Bebas dari Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris" tersebut Kepala Bappebti Bachrul Chairi mengharapkan peran aktif seluruh komponen PBK. Ditekankan kepada pelaku usaha maupun investor jangan ragu untuk melapor jika terdapat indikasi praktek pencucian uang dan pendanaan teroris dalam transaksi PBK yang terjadi.

Sosialisasi Sistem Resi Gudang Terus Digenjot



Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) terus digelar di banyak daerah di Indonesia. Seperti di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kegiatan yang diikuti puluhan Kelompok Tani (Poktan) berlangsung di Hotel Grand Situ Buleud, Rabu (10/5). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jabar sebagai penyelenggara. Wita Gusrianita, panitia pelaksana kegiatan, menjelaskan kegiatan ini difasilitasi Pemkab Purwakarta melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang Program Kementerian Perdagangan RI mengenai SRG dan Pasar Lelang

Komoditi (PLK) kepada seluruh Poktan yang hadir. Penjelasan mengenai SRG disampaikan secara runtun, mulai dari pendaftaran, pengajuan penyimpanan hasil komoditi para Poktan di gudang SRG, terbitnya Resi Gudang SRG sampai pada pengajuan penjualan atau pembelian komoditi di Pasar Lelang. "Diharapkan hal ini juga dapat meningkatkan pengetahuan pada seluruh kelompok tani mengenai alternatif pemasaran hasil komoditi yang mereka hasilkan," jelas Wita. Menurut Wita, dengan SRG petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik dengan menunda waktu penjualan. Selain itu, kualitas dan kuantitas barang yang disimpan juga bisa tetap terjaga. Entis Sutisna, Kepala Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, berharap pada semua peserta yang hadir dapat memberikan informasi kepada para petani maupun Poktan yang tidak bisa hadir dalam sosialisasi kali ini, sehingga semua petani dan Poktan yang ada di Purwakarta bisa mengetahui apa itu Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.

Sertifikat Internasional Untuk Kakao Jembrana



Penghargaan dari lembaga sertifikasi internasional diberikan untuk produk kakao fermentasi dari Kabupaten Jembrana, Bali. Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas produk kakao daerah ini. Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, di Negara, Selasa (9/5), mengatakan sertifikat itu dikeluarkan *United State Department of Agriculture* (USDA) dan *European Union* (EU) dari *Control Union*.

"Sertifikat internasional ini harus dipertahankan dengan menjaga kualitas dan kuantitas, agar produk kakao dari Jembrana tetap bermutu baik," kata Kembang Hartawan. Menurutnya, para petani kakao harus sering saling berkomunikasi untuk menjaga kualitas produknya. Suatu daerah akan dikenal memiliki produk pertanian yang bagus, jika seluruh petani sepakat menjaganya. "Mutu yang baik akan membuat dunia percaya dengan kakao Jembrana. Namun, hal itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh petani di Kabupaten Jembrana," jelasnya. Pengakuan ini akan berdampak positif dan membuat produk kakao fermentasi Jembrana diburu pembeli. Namun Kembang Hartawan mengingatkan para petani untuk tidak berbuat curang mengejar keuntungan sesaat. Ia mencontohkan pada masa keemasan vanili pernah terjadi di Jembrana, karena harganya yang tinggi ada beberapa oknum kemudian menyuntikkan pasir ke produk vanili mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. "Nah, jangan ada oknum yang ingin cepat kaya tapi mengorbankan petani lainnya dan membuat citra produk kakao Jembrana yang sudah bagus menjadi jelek," tegasnya.

Indonesia Pertanyakan Resolusi Uni Eropa Soal CPO

Negara-negara Uni Eropa melalui resolusi parlemennya menerapkan kampanye hitam dan pengetatan penggunaan produk sawit. Hal ini dipertanyakan oleh Pemerintah Indonesia. Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian dari Kemenko Bidang Perekonomian, menyatakan heran jika produk CPO Indonesia mendapat banyak kampanye negatif di Uni Eropa. Padahal, negara-negara di dunia tengah gencar-gencarnya mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan, yang salah satunya bisa didapat dari CPO melalui biodiesel. "Sawit juga menyediakan sumber energi, kok diprotes. Mana yang lebih baik untuk lingkungan, tanaman sawit atau pengeboran minyak? Itu tidak masuk akal kalau menolak biodiesel dari kelapa sawit, sementara BBM tidak ditolak. Jadi ini memang betul, ini (persoalan) dagang saja," ujar Musdalifah dalam diskusi "Membedah Kepentingan Tersembunyi di Balik Resolusi Sawit Eropa" di Jakarta, Selasa (9/5). Pemanfaatan lahan sektor perkebunan seperti untuk sawit sebenarnya akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Terlebih di tengah upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar



6 persen di 2018. Musdalifah menyebut perkebunan sawit yang ada di Indonesia juga berkontribusi terhadap penyediaan oksigen yang bersih bagi dunia. Namun sayangnya, hal itu tidak mau diakui negara-negara Uni Eropa. "Mereka tidak mengakui kalau tanaman sawit berkontribusi menyumbangkan banyak oksigen," tegasnya.

JFX Targetkan 22 Learning Center



Edukasi tentang perdagangan berjangka komoditi dipandang sangat penting dilakukan mengingat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bidang ini masih terbatas. Upaya pendidikan masyarakat ini terus dilakukan, seperti yang diselenggarakan oleh *Jakarta Future Exchange* (JFX). Tahun 2017 ini JFX menargetkan pembukaan *Futures Trading Learning Center* (FTLC) di 22 kampus di berbagai daerah. FTLC adalah wadah kerja sama antara industri, kampus, dan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang berperan memberikan pembekalan edukasi perihal industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

kepada kalangan civitas akademika. Saat ini, JFX telah membentuk 19 FTLC yang tersebar di seluruh nusantara. Direktur Utama JFX Stephanus Paulus Lumintang menyampaikan sebelumnya sarana edukasi FTLC bernama JFX Center. Program yang menasar entitas kampus ini sudah berlangsung sejak 2012. "Kami menargetkan jumlah FTLC pada 2017 mencapai 22 dari saat ini 19 lokasi," ujarnya dalam acara peresmian *Future Trading Learning Center* (FTLC) di Universitas Kristen Indonesia, belum lama ini. Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, dalam sambutannya menyampaikan sebenarnya pelajaran dasar dalam jurusan ekonomi di kampus cukup menjadi bekal bagi mahasiswa untuk melakukan investasi di PBK (Pasar Berjangka Komoditi). Ia berharap FTLC dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana edukasi. "Semua pelajaran di Fakultas Ekonomi dan PBK digabungkan sekaligus untuk prediksi harga. Ada perhitungan soal kondisi suplai dan permintaan, serta faktor makro. Kemudian, berbicara statistik mengenai peluang harga naik atau turun," paparnya. Menurut Kepala Bappebti, subyek PBK juga dapat masuk ke dalam kurikulum FE UKI. Hal ini bertujuan memajukan dunia pendidikan sekaligus calon pelaku usaha industri PBK di masa depan.

Harga CPO Mengalami Tren Menguat



Dalam dua bulan terakhir harga minyak kelapa sawit meningkat ke level tertinggi. Hal ini diakibatkan proyeksi meningkatnya ekspor Malaysia. Pemangkasan pajak ekspor Malaysia memberi suntikan tenaga pada harga minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) dalam jangka pendek. Tren penguatan harga hingga semester pertama semakin terjaga oleh prospek permintaan bulan Ramadhan.

Pada perdagangan Senin (22/5) pukul 16.59 WIB, harga CPO kontrak Agustus 2017 di bursa Malaysia meningkat 24 poin atau 0,91% menuju 2.659 ringgit (US\$617,65) per ton. Ini merupakan level tertinggi sejak 24 Maret 2017 di posisi 2.657 ringgit per ton. Chandran Sinnasamy, Direktur eksekutif LT International Futures, mengatakan harga CPO mengalami tren menguat setelah adanya indikasi peningkatan ekspor Malaysia yang menunjukkan pertumbuhan permintaan.

Dari data Intertek *Testing Service* ekspor minyak sawit Malaysia pada 1 Mei-20 Mei 2017 meningkat 20% *month on month* (mom) menjadi 846.705 ton dari sebelumnya 705.372 ton. Sebelumnya pada April 2017, pengapalan ke luar negeri 4,62% mom menjadi 1,12 juta ton dari periode yang sama pada bulan sebelumnya sebesar 1.076.240 ton. "Harga CPO akan mengalami tren peningkatan mengikuti kenaikan ekspor dari Malaysia. Penguatan harga CPO juga seiring dengan pergerakan minyak mentah dunia karena pertemuan OPEC," ujar Chandran Sinnasamy dikutip Bloomberg, Senin (22/5).

Harga CPO akan berada di dalam kisaran 2.630-2.730 ringgit per ton. Jika harga menanjak ke area 2.730-2.750 per ton aksi *profit taking* cenderung mendominasi pasar, kecuali ada informasi baru yang memicu *bullish*.

Kebijakan Malaysia untuk menurunkan pajak ekspor CPO memang memberi pengaruh positif pada prospek harga hingga akhir semester ini. Malaysia mengurangi pajak ekspor CPO bulan Juni menjadi 6% dari bulan Mei sebesar 7%. Apalagi, ditambah dengan momentum kenaikan permintaan di bulan Ramadhan.

Proyeksi Faisyal, Faisyal, *Research and Analyst* PT Monex Investindo Futures, CPO berpotensi melanjutkan pergerakan naik seiring ekspektasi meningkatnya permintaan ekspor Malaysia. CPO akan berada di kisaran RM 2.500 - RM 2.750 per metrik ton hingga akhir semester pertama. Meski pergerakan CPO saat ini ditopang sentimen positif, peluang koreksi harga masih terbuka. Salah satu sentimen negatifnya adalah angka permintaan CPO Indonesia.

Sebelumnya terlihat kenaikan yang sangat signifikan dari harga CPO. Kenaikan harga CPO berimbas terhadap aksi teknikal yang mendorong koreksi harga CPO. Harga komoditas ini sempat mengalami pelemahan selama tiga hari akibat pasar komoditas yang tertekan oleh pelaku pasar. Pada perdagangan harga CPO kontrak pengiriman Juli 2017 di *Malaysia Derivative Exchange* anjlok 0,74% ke level RM 2.529 per metrik ton jika dibandingkan pada perdagangan sebelumnya.

Indonesian Tea to be Promoted in Pakistan

The Consulate General of the Republic of Indonesia in Karachi, Pakistan, has sought to increase the penetration of Indonesian tea products in the Pakistan market. For that, the Indonesian government used some promotional events such as a recent promotion in Ocean Mall, Karachi.

Indonesian Consul General in Karachi, Dempo Awang Yuddie, said that the export value of Indonesian tea to Pakistan tend to decline in the last some years. In 2015, the value of Indonesia's tea export to this country was US\$12.4 million, which came down to US\$9.4 million in 2016.

As quoted by Antara, on May 16, Dempo noted that Indonesia was not the only tea supplier to Pakistan. Indonesia ranks ninth in the list of tea exporters to Pakistan after Kenya, Rwanda, India, Burundi, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam and Uganda.

Imported and local tea products are easily available in Pakistan owing to high consumption of tea in the country. The local custom is to drink black tea with sterilized milk (locally called *chai*) at least three times a day, in the morning, afternoon and evening.



Pakistan with a population of 200 million people cannot meet the needs of tea from domestic production, because the land to grow tea is limited owing to geographical factors.

In addition, local farmers consider tea less profitable than wheat, whose harvest period is shorter. Therefore, tea-producing countries have been competing to supply tea in Pakistan.

Market Operations Ahead of Ramadhan and Iedul Fitri

The State Logistic Agency (Bulog) has been carrying out market operation to stabilize the prices of garlic ahead of the fasting month of Ramadhan, which begins in late May 2017. During last several weeks the prices of garlic at markets in Jakarta and other cities in Indonesia continued to increase.

Head of Bulog's Jakarta branch Mansur said to a newspaper in Jakarta, Bulog prepared 24 tons of garlic for the market operation, which held in cooperation between Bulog and the Trade Ministry.

"Bulog sold garlic at Rp 36,000 (US\$2.69) per kilogram. We hope this can decrease the current garlic prices, especially in Jakarta," Mansur said. In traditional markets the price of garlic was about Rp50,000 per kilogram in early May. Market operations have already been held not only in Jakarta, but also in Bandung, Surabaya, and other cities.

It used to be that facing Ramadhan and Iedul Fitri the prices of such staples as rice, sugar, meat, cooking oil, garlic and onion tend to increase because of the rise of people's needs. So that, government has to intervene market to stabilize the prices.

As reported by *Antaranews.com*, the State Logistic Agency has stocked up two million tons of rice for



Food Stabilization Campaign throughout Indonesia during the fasting month Ramadhan and Idul Fitri. Bulogs President Director Djarot Kusumayakti stated, in addition to rice, the agency would also stock 320,000 tons of sugar, 37,500 tons of frozen meat, 207,000 liters of edible oil, 60,000 tons of onion, and 62 tons of garlic.

"Provision of staple food will not only be made available in Jakarta, but across the country from Sabang to Merauke," Djarot said at the launch of the Food Stabilization Campaign, in Jakarta, 17 May 2017, which was also attended by The Trade Minister Enggartiasto Lukita.



0812-821XXXX
Pertanyaan:
 Saya sudah lama mendengar apa yang namanya Resi Gudang. Apa saja komoditi yang bisa disimpan di sistem ini?

Jawab:
 Resi Gudang atau dalam bahasa asing disebut *warehouse receipt* adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang SRG. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013, ada sepuluh jenis komoditas yang dijamin dalam Sistem Resi Gudang, yakni gabah, beras, jagung, kopi, karet, kakao, lada, rumput laut, garam, dan rotan.

Terima kasih atas pertanyaannya, semoga dapat menambah wawasan Anda.

0878-810XXXX
Pertanyaan:
 Saya ingin mulai berbisnis dan saya dapat tawaran untuk berinvestasi di perdagangan berjangka. Katanya untungnya besar, benarkah?

Jawab:
 Untung besar atau kecil berbisnis itu relatif. Makin besar investasi yang ditanamkan tentu makin besar pula peluang untungnya. Apa yang dikatakan dalam bisnis perdagangan berjangka bisa untung besar memang demikian adanya. Tapi juga harus diingat biasanya janji untung besar harus juga dilihat risikonya. Perdagangan berjangka memang bisa memberikan untung besar, tapi risikonya juga besar. *High risk, high yield*. Karena itu perlu perhitungan yang matang.

Layanan SMS Center BAPPEBTI
 Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi Bappebti Kementerian Perdagangan dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901.

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
 *SMS dikenakan biaya reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

Certificated stock: Stocks of a commodity that have been inspected and found to be of a quality deliverable against futures contracts, stored at the delivery points designated as regular or acceptable for delivery by the commodity exchange. In grain called stocks in deliverable position.

Chicago Board of Trade (CBOT): Founded in 1848 with 82 original members, it had an active cash and forward contracting business at first. Although the records were destroyed in the fire of 1871, it is agreed that futures contracts were being traded there during the 1860s. Today, the CBOT is the largest exchange in the world. It is known for its grain, gold, and Treasury Bond futures, as well as options on T-Bond futures.

Chicago Mercantile Exchange (CME): The second largest futures exchange in the United States. Originally formed in 1874 as the Chicago Produce Exchange, the "Chicago Merc" was primarily a perishable agricultural products market (butter, eggs, poultry, etc.). The name was changed in 1919, and since then the CME has been an innovator in the industry. The CME trades financial futures, options, and stock index futures contracts. The CME is the largest exchange for futures contracts in live commodities, foreign currencies, and Eurodoll

Chooser Option: An option which is transacted at the present but which at some prespecified future date is chosen to be either a put or a call option.

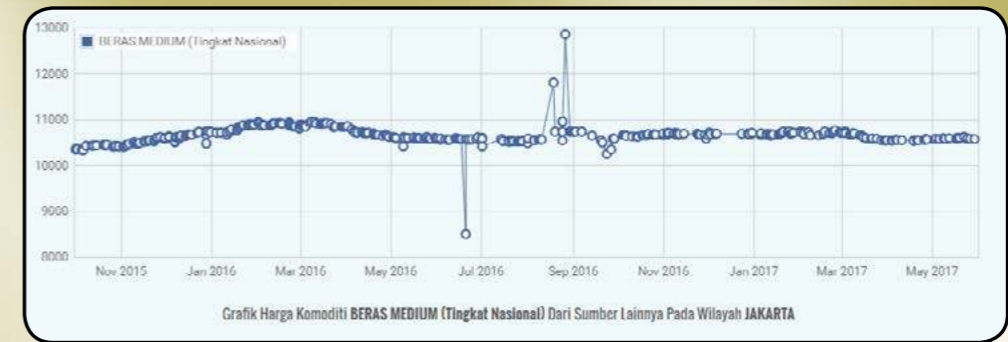
Churning: Excessive trading of an account by broker with control of the account for the purpose of generating commissions while disregarding the interests of the customer.

Circuit Breaker: A system of trading halts and price limits on equities and derivative markets designed to provide a cooling-off period during large, intraday market declines. The first known use of the term circuit breaker in this context was in the Report of the Presidential Task Force on Market Mechanisms (January 1988), which recommended that circuit breakers be adopted following the market break of October 1987.

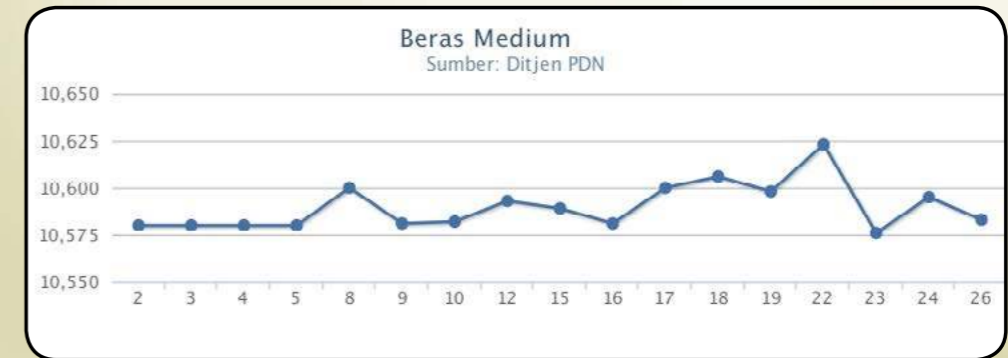
Clearing: The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract.

Clearing Corporation: An independent corporation that settles all trades made at the Jakarta Futures Exchange acting as a guarantor for all trades cleared by it, reconciles all clearing member firm accounts each day to ensure that all gains have been credited and all.

Clearing Margin: Financial safeguards to ensure that clearing members (usually companies or corporations) perform on their customers' open futures and options contracts.



Grafik Harga Komoditi BERAS MEDIUM (Tingkat Nasional) Dari Sumber Lainnya Pada Wilayah JAKARTA
http://infoharga.bappebti.go.id/harga_komoditi_pedagang



<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/charts/national-price-chart>

Dari grafik di atas terlihat perkembangan beras *medium* sejak September 2016 hingga medio 2017 relatif stabil pada kisaran harga antara Rp10.000-Rp11.000. Lebih rinci data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan pergerakan harga antara Rp10.575 hingga Rp10.625. Stabilitasnya harga beras ini tak lepas dari upaya pemerintah menyediakan stok beras yang cukup, sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan di pasar. Melihat kecenderungan ini masyarakat seyogyanya tenang karena kebutuhan pokok beras mencukupi di pasaran dengan harga yang stabil.



<http://harga-emas.org/grafik/>

Harga emas di Indonesia produksi PT Aneka Tambang yang menjadi acuan harga emas dalam negeri sepanjang tahun 2017 juga cenderung stabil pada level harga Rp. 590.000 per gram. Sementara harga emas dunia bergerak naik pasca pengumuman risalah rapat *The Fed* pada awal Mei lalu. Penguatan ini dinilai analis mampu bertahan hingga akhir tahun. Mengutip Bloomberg, Kamis (25/5) pukul 14.30 WIB, harga emas kontak pengiriman Juni 2017 di *Commodity Exchange* menguat 0,45% ke

level US\$ 1.258,7 per troy ounce dibanding sehari sebelumnya. Sementara selama sepekan harga emas telah menguat 0,21%. Walau begitu tidak tertutup kemungkinan potensi penurunan harga emas bisa terjadi lagi menjelang akhir tahun 2017. *The Fed* yang berencana menaikkan suku bunga antara November - Desember 2017 bisa saja kembali menekan harga emas ke level terendah hingga US\$ 1.200 per troy ounce.





Prof. Dr. Bustanul Arifin,
Guru Besar UNILA dan Ekonom Senior INDEF

Peran Sistem Resi Gudang dalam Pembangunan Pertanian

Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia terus tumbuh sebagai instrumen manajemen risiko (tunda jual, lindung nilai, dan jamin harga) serta akses pembiayaan. SRG sudah mulai diapresiasi oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), karena SRG dapat menjadi salah satu instrumen alternatif pengukuran ketersediaan stok daerah dan nasional, beras, gabah dan jagung.

Setelah melalui proses lama yang cukup berliku, kini masyarakat secara perlahan sudah mulai mengenal Resi Gudang. Pejabat Pemerintah di pusat dan daerah mulai memperbincangkan tentang Resi Gudang dan Sistem Resi Gudang. Bahkan, beberapa dari mereka telah membahas tentang kinerja Resi Gudang di Indonesia, sambil memikirkan masa depan Sistem Resi Gudang ke depan. Beberapa mahasiswa di Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi di sekian universitas di Indonesia telah mulai melakukan studi tentang Resi Gudang untuk tugas akhirnya.

Tentu masyarakat layak bertanya seberapa besar peran resi gudang dalam pembangunan pertanian, apalagi di tengah peningkatan harga-harga komoditas pertanian seperti sekarang. Harga gabah kering panen (GKP) pada April 2017 di atas Rp 4.300 per kilogram masih jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kilogram. Harga GKP kualitas rendah pun masih tercatat Rp 3.705 per kilogram, terutama karena telah memasuki musim panen. Harga gabah kering giling (GKG) juga cukup tinggi, Rp 5.220 per kilogram, jauh di atas HPP sebesar Rp 4.600 per kilogram. Dengan harga gabah di tingkat petani yang cukup tinggi, resi gudang menjadi tidak menarik bagi petani, karena harga di pasar masih cukup tinggi.

Sistem resi gudang adalah instrumen manajemen risiko (tunda jual, lindung nilai, dan jamin harga) serta akses pembiayaan. Resi gudang juga menjadi suatu jaminan kepastian usaha dan informasi guarantee bagi lembaga keuangan, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pertanian bagi petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Dalam konteks ini resi gudang menjadi suatu sistem insentif bagi tumbuhnya industri pergudangan dan usaha lain terkait sistem resi gudang (SRG).

Pada tingkat yang lebih makro, sistem resi gudang dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian stok pangan nasional dan komoditas strategis lainnya yang lebih efisien. SRG bahkan dapat menjadi instrumen penyaluran kredit bagi perbankan dan lembaga keuangan bukan bank-LKBB. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa SRG menjadi alternatif positif skema pembiayaan sektor pertanian dan bahkan intermediasi perekonomian secara umum. Resi gudang sendiri adalah suatu dokumen atau surat bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, yang diterbitkan



oleh pengelola gudang tertentu. SRG disebut suatu sistem karena merupakan suatu kesatuan utuh dari skema penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Resi gudang dapat dibuat dengan (1) atas nama, dan (2) atas perintah, yang berbentuk warkat dan tanpa warkat.

Kini SRG sudah dikembangkan di hampir 50 Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti: Bener Meriah, Simalungun, Indramayu, Bogor, Subang, Cianjur, Pekalongan, Karanganyar, Bantul, Demak, Jombang, Jepara, Banyumas, Kudus, Madiun, Mojokerto, Sragen, Nganjuk, Ngawi, Situbondo, Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Sampang, Barito Kuala, Lombok Timur, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Gowa, Sumbawa, Grobogan, Sumedang, Ciamis, Tangerang, Lombok Barat, Lebak, Tuban, Pasaman Barat, Deli Serdang dan Kota Makassar. Di negara-negara lain, SRG juga sudah berkembang pesat di Amerika Serikat untuk komoditas kapas, gandum, kedelai, kacang tanah, di Kanada (biji-bijian), Inggris (timah), Brazil (komoditas pertanian), Uni Emirat Arab (emas, minyak bumi), India (kapas, kedelai, kopi), Malaysia (lada), Filipina (pangan), Tanzania dan Uganda (kopi dan kapas),

Afrika Selatan (jagung) dan lainnya.

Kinerja resi gudang di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari kinerja produk pertanian dan kondisi perekonomian secara umum. Masyarakat awam juga cukup paham bahwa saat ini kapasitas produksi pertanian pangan sudah menurun, baik sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM). Faktor kinerja produksi pangan dan pertanian di suatu negara menjadi salah satu kunci keberhasilan SRG. Apabila kinerja produksi tidak baik, sudah hampir dapat dipastikan bahwa SRG juga tidak baik.

Di Indonesia, peningkatan produksi pangan tidak banyak didorong oleh perubahan teknologi pertanian dan adaptasi inovasi baru, tapi lebih banyak karena pertambahan luas panen atau luas tambah-tanam (LTT). Suatu studi tentang total *factor productivity* (TFP) di ASEAN yang dilakukan oleh Suo (2014) dari *National University of Singapore* (NUS) menunjukkan bahwa TFP Indonesia tercatat hanya 1 persen, lebih rendah dibanding TFP rata-rata ASEAN yang mencapai 1,4 persen. TFP Indonesia lebih banyak didorong oleh perubahan efisiensi teknis (TEC), bukan perubahan teknologi (TC) yang didorong oleh peningkatan produktivitas karena inovasi baru. Upaya Khusus Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai (Upsus Pajale) belum banyak terlihat signifikan dan belum terbukti memecahkan masalah kapasitas produksi.

Pada tahun 2016, berdasarkan data bulanan Badan Pusat Statistik (BPS) edisi Mei 2017 Indonesia masih mengimpor beras sampai 1,28 juta ton dengan nilai devisa yang terkuras sebesar US\$ 531,84 juta atau lebih dari Rp 7 triliun. Pada triwulan pertama tahun 2017 saja Indonesia telah mengimpor beras sekitar 44 ribu ton, senilai US\$ 26 juta atau Rp 348 miliar. Singkatnya, selama era Pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia telah mengimpor beras 2,7 juta ton atau setara Rp 15,3 triliun, suatu jumlah

yang tidak dapat dikatakan sedikit. Persoalan struktural sistem produksi dan perdagangan beras yang masih seperti saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan SRG di Indonesia.

Walaupun demikian, SRG sudah mulai diapresiasi oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), karena SRG dapat menjadi salah satu instrumen alternatif pengukuran ketersediaan stok daerah dan nasional, beras, gabah dan jagung. Pemerintah melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebenarnya telah mengembangkan data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE). Sistem informasi ini dapat mempercepat pengambilan keputusan kebijakan, penyebaran dan penyediaan bahan pangan di daerah-daerah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. Benar bahwa basis data pada IS-WARE masih terbatas pada gudang-gudang dalam SRG, dan belum terintegrasi dengan gudang di luar SRG. Intinya adalah apabila sistem informasi IS-WARE ini telah terbukti semakin efektif, upaya perluasan cakupan wilayah SRG perlu untuk terus dilakukan.

Secara singkat, sistem resi gudang (SRG) adalah salah satu sumber alternatif pembiayaan, upaya lindung nilai tahap awal, dan kontributor pada ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Diseminasi perlu terus dilakukan dengan metode yang lebih inovatif, seperti pertemuan lapangan (*field day*), pertukaran petani-kelompok tani, "*seeing is believing*", termasuk membuka peluang *action research* bagi kalangan akademik, misalnya kuliah kerja nyata (KKN) tematik. SRG perlu bekerjasama lebih dekat dengan TPID yang tersebar di 500 kabupaten/kota untuk berkontribusi pada upaya stabilisasi harga pangan dan pembangunan pertanian secara umum. Masyarakat masih perlu contoh konkrit *best practices* implementasi SRG yang andal di lapangan.



Tris Sudarto
 Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia

“
Sejak kuliah di STAN sampai hari-hari menjelang pensiunnya, Tris Sudarto selalu berhubungan erat dengan hitung-hitungan uang. Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) ini mengaku akan tetap setia dengan bidangnya. Kini ia tengah mengambil program doktoral dan siap menjalani tugas selanjutnya, termasuk menjadi dosen bidang studi keuangan.
 ”

Bersama Jatuh Bangun Kliring Berjangka Indonesia

Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk berkiprah di bidang yang sama selama berpuluh tahun, mengingat hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Di antara mereka yang punya kemampuan seperti itu tersebutlah nama Tris Sudarto. Lelaki lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) ini sudah 23 tahun sibuk dengan urusan kerjanya di PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

Kesemuanya bermula dari ketidaktahuan. Tris merasa tidak tahu akutansi, karena SMA (Sekolah Menengah Atas)-nya dari IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Namun, dalam cerita santainya di kantornya di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Tris tidak punya pilihan lain untuk saat itu. Baginya, yang penting setelah lulus SMA adalah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. “Saya mendaftar di STAN dan diterima. Alhamdulillah, sekolahnya gratis, malah ketika itu mahasiswanya dapat uang saku,” jelas Tri.

Ia kemudian menjalani ikatan dinas di BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) antara 1986-1989. Tahun 1994, ia masuk PT KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Sampai kini. Dari hanya staf biasa hingga direksi, kariernya sampai di tingkat puncak tangga perusahaan, Tris menjabat sebagai Direktur Utama, hingga dua kali masa jabatan. Baginya, jabatan yang diembannya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Saya masuk KBI karena penugasan dari BPKP. Ini memang sesuai bidang saya. Maka, mengabdilah saya disini,” tuturnya.

PT Kliring Berjangka Indonesia berdiri pada 25 Agustus 1984. Pada awalnya perusahaan ini bernama PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (KJBK) dengan layanan usaha melakukan registrasi atas pasar fisik komoditas karet, kopi dan kuota tekstil. Dalam perjalanannya terjadi beberapa perubahan, misalnya nama perusahaan berubah menjadi PT Kliring Berjangka

Indonesia (Persero) atau lebih dikenal sebutan PT KBI (Persero) pada 18 Juni 2001.

Berdasarkan Keputusan Kepala BAPPEBTI Np.55/BAPPEBTI/KP/1/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), PT KBI (Persero) mendapat tugas untuk melayani Kliring dan Penyelesaian Transaksi Atas Kontrak Berjangka Derivatif Indeks dan Mata Uang Asing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.48, tanggal 28 Desember 2006, PT KBI (Persero) mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp.82 miliar.

Selanjutnya PT KBI (Persero) memperoleh persetujuan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang sesuai Keputusan Kepala BAPPEBTI No.03/BAPPEBTI/Kep-SRG/SP/PUSREG/6/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Persetujuan sebagai Pusat Registrasi kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Sedangkan berdasarkan Surat Kepala

BAPPEBTI No.644/BAPPEBTI/12/2009 tanggal 08 Desember 2009 perihal Pengelolaan Sistem Tunggal SPA, PT KBI (Persero) ditetapkan sebagai Pengelola (Administrator) Sistem Pengawasan Tunggal SPA.

Tris Sudarto memang bisa disebut sebagai orang yang mengetahui benar “jatuh bangunnya” KBI, hal yang dianggapnya sebagai sukaduka berkarya di instansinya maupun untuk pribadinya. Ia menyebut dibanding dengan 10 tahun lalu, Persero yang kini punya pegawai secara keseluruhan 52 orang itu sudah lebih berkembang.

Dengan gaya bicaranya yang lembut. Tris menjelaskan bahwa usai Reformasi 1998, tepatnya tahun 1999-2003 menjadi masa paling sulit bagi KBI. Saat itu banyak piutang macet, transaksi kecil, sampai-sampai Tris hampir menyerah dan “lempar handuk”. Namun atasan di Kementerian BUMN terus memberi semangat. Tahun 2004 kondisi perusahaan mulai membaik dan ia merasa bersyukur PT KBI terus bertahan dan tumbuh seperti sekarang ini.

Seiring tumbuh kembangnya sistem informasi teknologi, KBI juga memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerja industri Perdagangan Berjangka Komoditi. KBI bekerjasama dengan *Jakarta Futures Exchange* (JFX) serta dengan dukungan Bappebti, pada 4 November 2015 mengadakan sosialisasi Sistem Informasi Transaksi Nasabah (SITNa). SITNa sendiri diluncurkan secara resmi pada 10 November 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Dengan SITNa selain monitoring transaksi nasabah melalui laporan konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) yang disediakan oleh pialang berjangka, maka setiap nasabah yang melakukan transaksi kontrak berjangka dapat juga memonitor hasil transaksinya melalui SITNa secara *real time* dari waktu ke waktu. “Pada prinsipnya, setiap investor yang bertransaksi perdagangan berjangka

melalui pialang yang transaksinya terjadi pada JFX dan KBI, berhak untuk memperoleh akses ke SITNa,” ujar Tris.

Di bawah manajemen yang dimotori Tris Sudarto, KBI terus melakukan berbagai inovasi dengan membuat produk-produk yang bisa menarik masyarakat, misalnya emas, sebagai kontrak berkala emas melalui produk KeMas (KBI Emas). Dalam hal ini KBI bekerjasama dengan PT. Pegadaian dan PT Pos. “Masyarakat bisa menabung emas melalui program ini. Tapi emasnya bukan dalam bentuk perhiasan, melainkan dalam bentuk emas murni dengan acuan harga yang ditetapkan oleh PT Aneka Tambang,” katanya.

Ayah dua anak yang sudah dewasa (Fajar Taufik Putranto dan Faris Mufid Madyaputra) ini mengaku pekerjaan yang digelutinya di KBI sangat spesifik. Karena itu ia merasa tidak mudah juga untuk mendapatkan SDM (sumberdaya manusia) yang siap pakai untuk terjun di KBI. Maka ketika rekrutmen diadakan, seorang karyawan baru diberi masa orientasi hampir satu tahun lamanya agar mengerti bidang yang dikerjakannya. “Ini untuk memastikan bahwa staf KBI harus menguasai *knowledge* yang cukup. Rekrutmen di KBI cukup ketat, dan harus lulusan S1,” tambah Tris.

Di ujung masa kariernya sebagai Dirut PT KBI, suami dari Misaida yang hobi membaca dan *traveling* ini menyatakan siap untuk melakukan pekerjaan lainnya jika ia masih mendapat kepercayaan untuk menjalankannya. “Tentu, jika tidak ada penugasan lagi dari negara saya siap. Tapi saya juga sedang kuliah S3 di UNJ (Universitas Negeri Jakarta), sehingga siap juga kalau nanti pensiun jadi dosen di bidang keuangan. Saya senang membagi ilmu pada orang banyak,” ujar Tris Sudarto dengan tenang sambil tersenyum.



“
Masyarakat bisa menabung emas melalui program KeMas. Tapi emasnya bukan dalam bentuk perhiasan, melainkan dalam bentuk emas murni dengan acuan harga yang ditetapkan oleh PT Aneka Tambang.
 ”



7-P DALAM SISTEM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI :

